

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Pengertian tentang Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dalam artian luas mencakup tindakan yang manusia lakukan untuk mendapatkan kondisi hidup yang lebih baik, hal itu tidak hanya dari segi ekonomi dan fisik, tetapi melibatkan aspek mental, sosial dan spiritual. Kesejahteraan sosial suatu kondisi kehidupan masyarakat, dapat dilihat dari pengertian kesejahteraan sosial yang tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 dalam (Fahrudin, 2018) menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Ilmu kesejahteraan sosial yaitu ilmu yang mengembangkan dan ilmu yang mengkaji kerangka pemikiran dan metodologi yang bisa dimanfaatkan agar kualitas hidup masyarakat meningkat diantaranya dukungan sosial, interaksi sosial, dukungan keluarga dan pelayanan sosial. Dapat disimpulkan bahwa fokus dari kesejahteraan sosial yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dan dapat menjalankan keberfungsian sosialnya dengan baik. Dalam konteks bidang kesejahteraan sosial untuk mendapat pelayan profesional dan dapat membantu individu, kelompok atau masyarakat mencapai kepuasan pribadi, maka profesi utama yang bekerja di dalamnya yaitu pekerja sosial.

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar kehidupan. Taraf hidup tidak hanya diukur dari segi fisik dan ekonomi melainkan memerhatikan aspek lainnya juga seperti sosial, mental dan spiritual. kesejahteraan sosial lanjut usia merupakan suatu tindakan sebagai sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat khususnya untuk para lanjut usia yang keberfungsian sosialnya tidak berjalan dengan baik, yaitu dengan memberikan pelayanan bantuan.

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Sebagai ilmu terapan dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang ada pada masyarakat. Kesejahteraan sosial memiliki tujuan-tujuan tertentu yang diharapkan dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan agar terwujudnya kondisi sejahtera. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, Kesehatan dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber peningkatan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan (Fahrudin, 2018).

2.1.3 Fungsi – Fungsi Kesejahteraan Sosial

Tujuan dari kesejahteraan sosial yaitu untuk mencapai kondisi kehidupan masyarakat yang sejahtera. Kondisi ini menunjukkan tatanan masyarakat yang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun beberapa fungsi kesejahteraan sosial menurut (Fahrudin, 2018) terdapat empat fungsi utama, diantaranya :

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*).

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*).

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi Kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

3. Fungsi Pengembangan (*Deveploment*).

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4. Fungsi Penunjang (*Supportive*).

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

Berdasarkan deskripsi diatas menunjukkan bahwa fungsi-fungsi tersebut sudah cukup menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial yaitu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang, kelompok, ataupun masyarakat. Kutipan diatas juga menjelaskan bahwa fungsi tersebut berusaha dicapai untuk mencegah munculnya masalah-masalah sosial baru.

2.2 Konsep Pekerjaan Sosial

2.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut (Zastrow, 1999 dalam Suharto 2014).

Sebagai suatu aktivitas profesional, pekerjaan sosial didasari oleh tiga komponen dasar yang secara integratif membentuk profil dan pendekatan pekerjaan sosial kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka keahlian (*body of skills*) dan kerangka nilai (*body of values*) yang diperolehnya melalui pendidikan formal dan pengalaman profesional. Ketiga perangkat tersebut membentuk pendekatan pekerjaan sosial dalam membantu kliennya (Fahrudin, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 pada pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Profesi pekerjaan sosial mendorong pemecahan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, perubahan sosial, pemberdayaan dan pembebasan manusia, serta perbaikan masyarakat. Menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik (atau situasi) dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak azasi manusia dan keadilan sosial sangat penting bagi pekerjaan sosial (Suharto, 2014:123&125).

Pekerjaan sosial merupakan aktivitas yang direncanakan untuk menghasilkan suatu perubahan; menyangkut interaksi orang dengan lingkungan

sosialnya; bertujuan memantu orang atau institusi sosial agar dengan interaksi sosial tersebut ia dapat menjalankan tugas-tugas kehidupan dan fungsi sosialnya dengan baik; dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi; serta mewujudkan, aspirasi mereka. Hal ini termasuk menghubungkan orang dengan sumber-sumber pekerjaan sosial (Syamsi & Haryanto 2018:136). *International Federation of Social Work (IFSW)* dalam *Conference Social Work Global Agenda 2020-2030* menyatakan bahwa: “Pekerjaan sosial adalah profesi berbasis praktik dan disiplin akademis yang mempromosikan perubahan dan pengembangan sosial, kohesi sosial, dan pemberdayaan dan pembebasan orang. Prinsip-prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, tanggung jawab kolektif, dan penghormatan terhadap perbedaan merupakan hal yang sentral dalam pekerjaan sosial. Praktik pekerjaan sosial didukung oleh teori pekerjaan sosial, ilmu sosial, humaniora dan pengetahuan asli, pekerjaan sosial melibatkan orang dan struktur untuk mengatasi tantangan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan”. Peningkatan peran pekerja sosial profesional, yakni yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian pekerjaan sosial, dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial. Pekerja sosial dalam melakukan praktek dengan anak harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang tahap perkembangan anak secara normatif. Pengetahuan yang normatif tentang perkembangan anak berguna sebagai panduan karena banyak anak-anak yang dihadapi pekerja sosial tidak memiliki kondisi normal seperti anak pada umumnya. Mandat utama pekerja sosial adalah memberikan pelayanan sosial baik kepada individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat yang membutuhkannya sesuai dengan nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan profesi pekerjaan sosial.

Fokus utama pekerjaan sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial (*social functioning*) melalui intervensi yang bertujuan atau bermakna. Keberfungsian sosial merupakan konsepsi penting bagi pekerjaan sosial, ia merupakan resultante dari interaksi individu dengan berbagai sistem sosial di masyarakat, seperti sistem pendidikan, sistem keagamaan, sistem keluarga, sistem politik, sistem pelayanan sosial, dan seterusnya.

Secara paradigmatik, model pertolongan pekerjaan sosial sangat tergantung atau dipengaruhi oleh beroperasinya 5C, yakni:

1. *Concept* (konsep); menunjukkan pada perumusan konsep-konsep pekerjaan sosial yang akan dijadikan fokus of inquiry secara ringkas, menarik, dan jelas.
2. *Commitment* (komitmen); penerimaan secara konsisten terhadap konsep yang telah didefinisikan dan akan digunakan sebagai pisau analisis.
3. *Capability* (kapabilitas atau kemampuan); kemampuan atau keahlian dalam mengaplikasikan konsep.
4. *Connection* (koneksi atau jaringan); koneksi atau jaringan dengan nama praktik pekerjaan sosial beroperasi, baik dengan teman sejawat dalam bingkai asosiasi profesi atau dengan profesi lain secara teamwork.
5. *Communication* (komunikasi); mengkomunikasikan setiap hasil praktik dalam bentuk jurnal, buku. Bagi masyarakat modern, publikasi tertulis merupakan dinamika sentral (*zeitgeists*) dan pendefinisi kemajuan peradaban. Asas dasar umum (*general principles*) pekerjaan sosial tumbuh atas dasar nilai-nilai dan keyakinan yang berkembang di masyarakat.

Asas tersebut didasarkan atas sikap saling menghormati dan mengutamakan hak-hak semua orang. dengan kata lain, asas dasar umum ini lahir dari tujuan pekerjaan sosial yang dimaksudkan untuk mencegah, mengurangi, dan mengatasi hambatan-hambatan terhadap perkembangan yang sehat yang di alami oleh individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, digunakan untuk mengembangkan potensipotensi yang di miliki sehingga mereka dapat menjalankan tugas kehidupan dan fungsi sosialnya dengan baik serta mendukung pencapaian aspirasi maupun nilai-nilai yang ingin diwujudkan (Syamsi & Haryanto 2018:136-137).

2.2.2 Peran-Peran Pekerjaan Sosial

Dalam proses pertolongannya, peranan pekerja sosial sangat beragam tergantung pada konteksnya. Secara umum pekerja sosial dapat berperan sebagai mediator, fasilitator atau pendamping, pembimbing, perencana, dan pemecahan masalah. Secara garis besar, ada empat tugas profesi pekerjaan sosial (lihat 35 Suharto, 2006):

1. Meningkatkan kapasitas orang dalam mengatasi masalah yang dihadapi klien.
Dalam menjalankan peran ini, pekerja sosial mengidentifikasi hambatan-hambatan klien dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pekerja sosial juga menggali kekuatan-kekuatan yang ada pada diri klien guna mengembangkan solusi dan rencana pertolongan.
2. Menggali dan menghubungkan sumber-sumber yang tersedia di sekitar klien. Beberapa tugas pekerja sosial yang terkait dengan peran ini antara lain:
 - a. membantu klien menjangkau sumber-sumber yang diperlukannya;
 - b. mengembangkan program pelayanan sosial yang mampu memberikan manfaat optimal bagi klien,

- c. meningkatkan komunikasi diantara para petugas kemanusiaan; dan
 - d. mengatasi hambatan-hambatan dalam proses pelayanan sosial bagi klien.
2. Meningkatkan jaringan pelayanan sosial. tujuan utama peran ini adalah untuk menjamin bahwa sistem kesejahteraan sosial berjalan secara manusiawi, sensitif terhadap kebutuhan warga setempat dan secara manusiawi, sensitif terhadap kebutuhan warga setempat dan efektif dalam memberikan pelayanan sosial terhadap masyarakat.
 3. Mempromosikan keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial. menjalankan peran ini, pekerja sosial mengidentifikasi isu-isu sosial dan implikasinya bagi kehidupan masyarakat. Kemudian pekerja sosial membuat naskah kebijakan (policy paper) yang memuat rekomendasi-rekomendasi bagi pengembangan kebijakan-kebijakan baru maupun perbaikan atau pergantian kebijakan-kebijakan lama yang tidak berjalan efektif. Selain itu, dalam melaksanakan peran ini, pekerja sosial juga bisa menterjemahkan kebijakan-kebijakan publik ke dalam program dan pelayanan sosial yang dibutuhkan klien (Suharto, 2014:128). Berdasarkan uraian diatas, keterlibatan peran pekerja sosial terhadap anak autistik sangat penting karena keterlibatan pekerja sosial dalam mengintervensi klien dapat membantu dalam keberfungsian sosial dan perkembangan pada lingkungan sosialnya. Selain itu, peran pekerja sosial juga bersama-sama dengan keluarga anak dengan autisme dapat memberikan dukungan sosial dan memotivasi anak dengan autisme tersebut. Pekerja sosial bukan hanya melihat dari sudut kelemahan atau kekurangan yang ada pada diri klien, tetapi juga pekerja sosial melihat dari potensi yang dimiliki oleh klien.

Pekerja sosial dalam menjalankan praktiknya tentunya memiliki peran-peran tertentu, yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok atau komunitas dan masyarakat agar dapat mengungkapkan dan memenuhi kebutuhan, mengatasi masalah mereka, dan mengembangkan kemampuan mereka. Beberapa peran pekerja sosial dikutip dari Huda (2009:205) adalah:

1. *Enabler*: Dalam peran ini, pekerja sosial membantu klien untuk memenuhi kebutuhannya, mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi solusi-solusi strategi dan mengembangkan kapasitasnya sehingga masalahnya dapat teratasi secara efektif.
2. *Broker*: Tidak semua orang mempunyai hubungan yang baik dengan sumber-sumber pelayanan sosial. Baik karena pengetahuan yang minim maupun keahliannya yang terbatas. Pekerja sosial dapat berperan sebagai broker (pialang sosial) yang menghubungkan seseorang (klien) dengan sistem sumber yang dibutuhkan.
3. *Advocate*: Peran ini dipinjam dari dunia hukum. Hak-hak klien sebagai warga Negara acap kali terabaikan karena faktor-faktor tertentu. sebagaimana halnya pengacara (advocate), pekerja sosial dapat berperan membela kepentingan klien agar hak-hak yang semestinya diperoleh dapat terpenuhi.
4. *Pendidik*: Salah satu masalah yang sering dihadapi klien adalah adanya keterbatasan pengetahuan maupun *skill* dalam bidang tertentu yang mengakibatkan klien berada dalam status kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantage group*).

5. Memberdayakan: Adanya kekuatan maupun potensi pada diri klien menjadi prinsip utama dalam proses penyembuhan sosial. Karena itu, pekerja sosial berperan untuk memberdayakan klien terhadap potensi maupun kekuatan yang dimilikinya.
6. Aktivis: Sering kali peran menjadi aktivis dapat dilakukan oleh pekerja sosial. Jadi pada dasarnya aktivis pergerakan sosial seorang pekerja sosial yang bekerja untuk menjunjung tinggi keadilan sosial ataupun persamaan hak adalah bagian dari profesi pekerja sosial. Melaksanakan peran dalam menyelesaikan atau meminimalisir permasalahan dan hambatan yang di terjadi dalam memberikan pelayanan sosial kepada klien, seorang pekerja sosial harus memiliki kemampuan atau kecakapan berupa keterampilan tertentu secara efektif dalam praktik pelayanan sosial kepada klien.

Keterampilan ini pada dasarnya merupakan alat untuk memadukan antara kerangka pengetahuan yang di miliki pekerja sosial dan kerangka nilai yang diharapkan praktik pekerjaan sosial yang dilaksanakan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah. Keterampilan pekerjaan sosial menurut Beulah R. Compton & Burt Galawy (2009) merupakan kemampuan para pekerja sosial untuk menetapkan suatu misi dalam kaitannya dengan klien, baik klien individu, keluarga, kelompok, maupun komunitas sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan proses interaksi psikososial yang perubahannya didasarkan pada nilai dan pengetahuan pekerjaan sosial untuk mengintervensi situasi permasalahan klien yang khusus (Syamsi & Haryanto 2018:139).

Penguasaan keterampilan bagi pekerja sosial bersifat meningkat, artinya dari tingkat yang rendah sampai tingkat yang tinggi. Frampton (2000) mengatakan bahwa pekerja sosial diharapkan menguasai lima keterampilan dasar pekerjaan sosial, sebagai berikut:

1. Keterampilan memberikan pertolongan dasar (*Basic Helping skills*) Pekerja sosial hendaknya mampu dan bersedia membantu orang lain, baik individu, keluarga, organisasi, atau masyarakat yang membutuhkan pertolongan dengan cara membina relasi yang baik dan menghubungkannya dengan pihak lain yang terkait. Prinsip dasar dalam pertolongan diantaranya; kesediaan menerima orang lain sebagai rekan kerja, menyembuhkan orang, kesediaan memelihara hak-hak orang lain, menjalin kerja sama, dan memelihara integritas diri.
2. Keterampilan melakukan perjanjian (*engagement skills*) Pekerja sosial hendaknya mampu membuat perjanjian dengan klien berkenaan dengan waktu, tempat, dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Ketika keterampilan pekerja sosial ini dapat dikuasai dan dapat membangun relasi yang baik dengan klien akan mempermudah dalam mengungkapkan permasalahan, membuat rencana kerja yang akan dilaksanakan, dan melaksanakan tindakan pertolongan kepada klien.
3. Keterampilan melakukan observasi (*observation skills*) Pekerja sosial hendaknya mampu mengobservasi apa yang dikatakan, dilakukan, dan di sembunyikan oleh klien, serta situasi sosial yang mempengaruhi tindakannya sehingga pekerja sosial tidak mengalami kesalahan dalam menangkap permasalahan utama yang dialami klien. Kecermatan pekerja sosial dalam

melakukan observasi ini sangat menentukan keberhasilan dalam memberikan pertolongan yang tepat terhadap klien.

4. Keterampilan melakukan komunikasi (*communication skills*) Pekerja sosial hendaknya mampu menjalin komunikasi dengan klien, baik secara verbal maupun nonverbal sehingga akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan dapat berbicara dari hati ke hati dengan klien. Dengan komunikasi yang baik, klien dapat mempercayai pekerja sosial untuk mengungkapkan permasalahan yang dialaminya dengan jujur dan terbuka sehingga mempermudah pekerja sosial memahami permasalahan klien dan memberikan pertolongan yang dibutuhkannya.
5. Keterampilan berempati (*empathy skills*) Pekerja sosial hendaknya dapat merasakan seperti apa yang di rasakan kliennya sehingga ia dapat memahami keadaan dan perasaan klien serta situasi sosial yang menjadi penyebab suatu permasalahan. Dengan empati yang baik diharapkan terjadi kepercayaan dan pemahaman yang baik terhadap pekerja sosial dan relasi yang baik antara keduanya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Penguasaan lima keterampilan dasar di atas, diharapkan pekerja sosial dapat masuk ke dalam diri dan situasi klien, serta dapat memberikan pelayanan sosial sesuai dengan permasalahan yang dihadapi klien dan jenis pelayanan atau bentuk pertolongan yang dibutuhkan (Syamsi & Haryanto 2018:140-141). Sasaran dari pekerjaan sosial adalah seseorang, baik sebagai individu maupun sebagai kolektivitas (keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat) yang mengalami permasalahan dalam menjalankan interaksi sosial dengan lingkungannya,

mengalami hambatan dalam menjalankan tugas kehidupan. Menjalankan pekerjaan sosial diperlukan metode tertentu, seperti metode *social case work*, *social group work*, dan *community organization*.

2.2.3 Metode Pekerjaan Sosial

Metode pekerjaan sosial merupakan suatu prosedur kerja yang teratur dan dilaksanakan secara sistematis digunakan oleh pekerja sosial dalam memberikan pelayanan sosial. terdapat beberapa metode yang digunakan untuk membantu klien dalam mengatasi permasalahannya.

2.3.3.1. Metode Social Group Work

Bimbingan sosial kelompok (*social group work*) merupakan suatu aktivitas menolong individu yang terikat didalam kelompok yang diberikan oleh pekerja sosial. Dengan demikian, individu dapat bergaul dengan sesama anggota kelompok secara baik dan dapat mengambil keputusan manfaat dari pengalaman pergaulan atau perkembangan pribadi, kelompok, dan masyarakat.

Tujuan *social group work* yakni individu dapat mengambil manfaat dari pengalaman pergaulan sesuai kebutuhan dan kemampuannya dengan sesama anggota kelompok, serta untuk mencapai kemajuan atau perkembangan pribadi, kelompok, dan masyarakat. Komponen dalam *social group work* memiliki empat komponen yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

1. *Klien*: individu yang terikat menjadi kelompok (anggota kelompok)
2. Permasalahan yang dihadapi: individu yang terikat dalam kelompok mengalami permasalahan di dalam kehidupan kelompoknya, seperti tidak dapat bekerja sama dengan anggota kelompok lain, tidak bisa menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompoknya, merasa rendah diri minder, dan kurang kurang

percaya diri, merasa frustrasi karena tidak bisa mengikuti kegiatan kelompoknya, terjadi ketegangan antaranggota, ada masalah dalam kelompok yang belum terpecahkan, dan sebagainya.

3. Tempat untuk memecahkan masalah: dapat dilaksanakan di badan (lembaga sosial) tempat pekerja sosial memberikan pelayanan sosial atau dapat juga dilaksanakan ditempat kelompok tersebut berada.
4. Pekerja sosial sebagai tenaga profesional yang membantu memecahkan masalah: pekerja sosial perlu mengenal masing-masing individu dalam kelompok dan mengerti berbagai kebutuhannya, dengan demikian dapat membantu mengembangkan diri secara optimal sesuai kemampuan masing-masing. Komponen diatas merupakan hal yang saling berkaitan, sehingga bentuk dari intervensi yang dilakukan juga disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi dan begitu juga dengan hal-hal yang dapat membantu klien.

2.3.3.2. Metode Social Case Work

Friedlander (1996) dalam bukunya yang berjudul *Introduction to Social Welfare*, mendefinisikan *Social Case Work* adalah cara menolong seseorang dengan konsultasi untuk memperbaiki hubungan sosialnya sehingga memungkinkan tercapainya kehidupan yang memuaskan dan bermanfaat. Komponen dalam social case work dikemukakan oleh Abin Syamsudin Makmun (1999) sebagai sebuah sistem berikut:

1. Pribadi yang ditolong (*person/client*): individu, seseorang, atau klien adalah siapa saja yang membutuhkan pertolongan, baik laki-laki, perempuan, anak, remaja, maupun orang dewasa.

2. Permasalahan yang dihadapi (*problem*): kesulitan yang timbul akibat tidak terpenuhinya kebutuhan, rintangan-rintangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan atau kumpulan kekecewaan, ketidakmampuan menyesuaikan diri, dan sebagainya.
3. Tempat untuk memecahkan masalah (*place*): kantor, badan, atau lembaga sosial yang menyelenggarakan pelayanan berupa pertolongan dan bantuan sosial.
4. Pekerja sosial sebagai tenaga profesional yang membantu memecahkan masalah (*case work*): pekerja sosial yang memiliki sejumlah pengetahuan dan keterampilan di bidang pekerjaan sosial dan memiliki kewenangan untuk menolong klien dengan suatu proses sehingga permasalahan yang dihadapi klien dapat diatasi dengan baik. Prinsip Praktik *Social Case Work* Kartini Kartono (2008), prinsip praktik *social case work* terbagi dalam dua macam. Prinsip umum itu yakni, Pertama prinsip umum; prinsip yang digunakan untuk semua jenis pekerjaan *social case work*. Kedua prinsip khusus; yang hanya di pergunakan sesuai dengan masalah yang dihadapi klien. Achlis (2003) berpendapat prinsip umum yang diterapkan dalam praktik pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:
 1. Prinsip Penerimaan (*The Principles of Acceptance*) Pekerja sosial hendaknya dapat menerima klien secara apa adanya, lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya, serta menghargai dan menghormatinya secara manusia.
 2. Prinsip Hubungan (*The Principles of Communication*) Pekerja sosial hendaknya dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan klien sehingga klien percaya dan bersedia mengungkapkan permasalahan, situasi, dan kondisi yang

dialami dan dirasakannya secara terbuka. Pekerja sosial juga dapat menjelaskan peranannya dan peranan (posisi) klien dalam proses pemecahan masalah yang akan dilaksanakan bersama klien.

3. Prinsip Individualisasi (*The Principles of Individualization*) Pekerja sosial hendaknya dapat memandang dan memperlakukan klien sebagai suatu pribadi unik yang berdiri sendiri dan berbeda dengan klien lain. Memilih tindakan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi klien dan faktor-faktor yang mempengaruhi serta mempertimbangkan kekhususan (karakteristik) yang dimiliki oleh individu yang bersangkutan).
4. Prinsip Partisipasi (*The Principles of Participation*) Pekerja sosial hendaknya dapat mengikutsertakan klien secara aktif dalam usaha pertolongan yang dilakukan dengan cara memanfaatkan potensi atau kemampuan yang dimiliki klien secara optimal, dengan membimbing, mendorong, dan menimbulkan semangat klien untuk menentukan situasi dan permasalahannya sendiri, memilih cara-cara penyelesaian yang sesuai dengan dirinya, serta mendukung kegiatan yang dilaksanakan.
5. Prinsip Kerahasiaan (*The Principles of Confidentiality*) Pekerja sosial hendaknya dapat menyimpan atau merahasiakan keterangan yang diberikan klien dan tidak memberitahukan (membicarakannya) kepada siapapun tanpa seizin klien yang bersangkutan.
6. Prinsip Kesadaran Diri Pekerja Sosial (*The Principles of Case Worker Self Awareness*) Pekerja sosial hendaknya menyadari bahwa ia adalah seorang pekerja sosial yang sadar akan kedudukannya sehingga dalam keadaan

bagaimanapun tidak terpengaruh oleh klien yang dapat berakibat tidak baik pada pekerjaannya.

Teknik-teknik dalam Pekerjaan Sosial

Naomi Brill menyatakan bahwa terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan oleh pekerja sosial dalam menangani klien individu dan keluarga. Teknik-teknik tersebut adalah (Syamsi & Haryanto 2018):

1. *Small Talk*

Teknik ini digunakan oleh pekerja sosial pada saat kontak permulaan dengan klien. Tujuan utama *small talk* adalah terciptanya suatu suasana yang dapat memberikan kemudahan bagi keduanya untuk melakukan pembicaraan sehingga hubungan selanjutnya dalam proses intervensi akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Biasanya *small talk* dimulai oleh pekerja sosial untuk membuka agar klien dapat berbicara.

2. *Ventilation*

Teknik ini digunakan oleh pekerja sosial untuk membawa ke permukaan perasaan-perasaan dan sikap-sikap yang diperlukan, sehingga perasaan-perasaan dan sikap-sikap tersebut dapat mengurangi masalah yang dihadapi klien. Pekerja sosial dituntut untuk dapat menyediakan kemudahan bagi klien dalam mengungkapkan emosinya secara terbuka. Tujuan *ventilation* adalah untuk menjernihkan emosi yang tertekan karena dapat menjadi penghalang bagi gerakan positif klien. Dengan membantu klien menyatakan perasaan-perasaannya, maka pekerja sosial akan lebih siap melaksanakan tindakan pemecahan masalah serta dapat memusatkan perhatiannya pada perubahan pada diri klien.

3. *Support*

Teknik ini mengandung arti memberikan semangat, menyokong dan mendorong aspek-aspek dari fungsi klien, seperti kekuatan-kekuatan internalnya, cara berperilaku dan hubungannya dengan orang lain. Support harus didasarkan pada kenyataan dan pekerja sosial memberikan dukungan terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan positif dari klien. Pekerja sosial harus membantu klien apabila klien mengalami kegagalan dan sebaliknya lebih mendorong klien apabila berhasil. Sebaiknya pekerja sosial menyatakan terlebih dahulu aspek-aspek yang positif sebelum menyatakan aspek-aspek negatif dari situasi yang dialami klien.

4. *Manipulation*

Teknik ini merupakan keterampilan pekerja sosial dalam mengelola kegiatan, orang-orang dan sumber-sumber yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah klien. Pekerja sosial harus memperhatikan: kebutuhan dan hak-hak klien untuk terikat dalam tindakan dan pengambilan keputusan; kemampuan klien untuk berpartisipasi; dan membedakan antara kegiatan-kegiatan untuk kepentingan pekerja sosial dengan kegiatan untuk kepentingan klien.

5. *Konseling*

Konseling adalah inti dari *praktek sosial casework*. Pelayanan konseling diberikan untuk terapi masalah-masalah emosional dan interpersonal individu dan keluarga. Terdapat tiga tahap dalam konseling, yaitu: (a) tahap membangun relasi, (b) tahap mengeksplorasi masalah secara mendalam; dan (c) tahap mengeksplorasi alternatif-alternatif solusinya. Konseling bagi individu dan keluarga tepat diberikan

untuk mengatasi masalah-masalah sosial-emosional, seperti masalah *posttraumatic stress disorder*.

6. Terapi Kelompok

Terapi kelompok bertujuan untuk memudahkan penyesuaian diri secara sosial dan emosional (*social-emotional adjustment*) bagi individu-individu melalui proses kelompok. Partisipan biasanya memiliki kesulitan-kesulitan dalam menyesuaikan diri. Terapi ini dioperasikan dengan membentuk tipe-tipe kelompok sesuai kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi. Beberapa tipe kelompok yang kemungkinan relevan untuk masalah-masalah yang dialami oleh individu dan keluarga adalah: (a) kelompok rekreasi yang bertujuan untuk memberikan kesenangan, (b) kelompok rekreasi-keterampilan, yaitu tipe kelompok yang bertujuan selain memberikan kesenangan juga mengembangkan keterampilan-keterampilan; (c) kelompok penyembuhan, yaitu kelompok yang dibentuk untuk menyembuhkan masalah-masalah sosial-emosional; (d) kelompok sosialisasi, yaitu tipe kelompok yang bertujuan untuk mengajarkan bagaimana seharusnya berperilaku sehingga tercapai penyesuaian diri; (e) kelompok pelatihan kepekaan, yaitu tipe kelompok yang bertujuan untuk melatih orang - orang yang tidak peka menjadi peka.

7. *Reward and Punishment*

Reward diberikan untuk perilaku yang baik dan *punishment* (hukuman) diberikan untuk perilaku yang buruk. Teknik ini digunakan dengan tujuan mengubah perilaku klien dan pekerja sosial harus memiliki keterampilan khusus untuk mengetahui motif-motif perilaku dan metode penguatan (*enforcement*).

8. *Activities and Programs*

Teknik ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi klien melalui suatu sarana tertentu. Klien diberikesempatan untuk mengungkapkan perasaan-perasaan tentang kesulitannya dan membawa keluar atau mengatasi secara langsung kebutuhan dan masalah tersebut pada tingkat non verbal atau situasi permainan. Musik, tarian, permainan, drama, kerajinan tangan, merupakan media untuk menggambarkan kebutuhan dan kesulitan yang dihadapi klien. Pekerja sosial harus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu memilih media terbaik untuk menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan dan situasi-situasi klien.

2.3 Masalah Sosial

2.3.1 Pengertian Masalah Sosial

Masalah Sosial adalah suatu yang ketidak sesuaian antara unsurunsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Permasalahan sosial dibedakan menjadi dua macam yaitu antara masalah masyarakat (*scientific or societal problems*) dengan problema sosial (*amelioratavie or social problems*). Yang pertama tentang menyangkut analisis tentang macam-macam gejala kehidupan masyarakat.

Sedangkan yang kedua meneliti gejala-gejala abnormal masyarakat dengan maksud untuk memperbaiki atau bahkan untuk menghilangkannya. Pada dasarnya, masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan, karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan

hukum dan bersifat merusak. Sebab itu masalah–masalah sosial tak akan mungkin tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. (Soekanto Soerjono,1990:401).

2.3.2 Sebab-sebab terjadinya Masalah Sosial

Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis dan kebudayaan setiap masyarakat mempunyai norma yang bersangkutan-paut dengan kesejahteraan, kebendaan, kesehatan fisik, kesehatan mental, serta penyusaain diri indivindu atau kelompok sosial. Penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma tersebut merupakan gejala abnormal yang merupakan masalah sosial. (Soekanto Soerjono,1990:401).

2.3.3 Macam-Macam Masalah Sosial

Masalah sosial dianggap sebagai masalah masyarakat tergantung dari sistem nilai sosial masyarakat terserbut adapun beberapa masalah sosial yang di hadapi masyarakat-masyarakat pada umumnya sama yaitu: (Soekanto Soerjono,1990:416).

1. Kemiskinan
2. Kejobatan
3. Disorganisasi Keluarga
4. Masalah Generasi Muda dalam Masyarakat Modern
5. Peperangan
6. Pelanggaran Terhadap Norma-norma Masyarakat
7. Masalah Kpendudukan
8. Masalah Lingkungan Hidup
9. Birokrasi

Kemiskinan diartikan sebagai sesuatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. (Soekanto Soerjono,1990:406).

Peperangan mungkin merupakan masalah sosial paling sulit dipecahkan sepanjang sejarah kehidupan manusia. Masalah peperangan berbeda dengan masalah sosial lainnya karena menyangkut beberapa masyarakat sekaligus, sehingga memerlukan kerja sama internasional yang hingga kini belum berkembang dengan baik. (Soekanto Soerjono,1990:416).

Kelaparan adalah suatu kondisi di mana tubuh masih membutuhkan makanan, kelaparan salah satu bentuk ekstrem dari nafsu makan normal. Istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk kepada kondisi kekurangan gizi yang dialami sekelompok orang dalam jumlah besar untuk jangka waktu yang relatif lama, biasanya karena kemiskinan, konflik politik, maupun kekeringan cuaca.

2.4 Keberfungsian Sosial

Keberfungsian sosial adalah kegiatan seseorang dalam menjalankan perannya di dalam lingkungan sosial. Setiap orang berperan dalam menjalankan kehidupannya baik dalam segi pemenuhan kebutuhan, menjalankan peran maupun menjalankan tugas-tugasnya. Keberfungsian sosial merupakan cara-cara yang digunakan orang baik sebagai individu maupun kolektifitas dalam bertingkah laku atau bertindak untuk untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memenuhi kebutuhan. Keberfungsian sosial biasa disebut *social functioning*, *social functioning* menurut Sukoco (2011: 25) adalah sebagai berikut: “Pengertian *social functioning* mengarah kepada cara yang dipengaruhi orang dalam melaksanakan

tugas-tugas kehidupan, memecahkan permasalahan maupun memenuhi kebutuhan”. Keberfungsian sosial (*social functioning*) suatu kemampuan dalam diri seseorang dalam melaksanakan tugas dan perannya di dalam lingkungan sosialnya demi mencapai sebuah nilai tertentu serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberfungsian sosial (*social functioning*) seseorang berkaitan dengan cara pandang seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.

Cara pandang seseorang sangat mempengaruhi karena dengan cara pandang yang negatif dapat mengakibatkan ketidak mampuan seseorang dalam pemenuhan kebutuhan. Cara seseorang memecahkan permasalahan yang sedang dialami dirinya. Keberfungsian sosial (*social functioning*) merupakan fokus intervensi pekerjaan sosial dimana pekerjaan sosial membuat klien menjadi berfungsi lagi dalam menjalankan perannya di dalam lingkungan masyarakat. Pengertian konsep keberfungsian sosial menurut Siswosoemarto (2012: 450) adalah: “Konsep keberfungsian sosial pada intinya merujuk kepada “kapabilitas” (*capabilities*) individu, keluarga, atau masyarakat dalam menjalankan peranan sosial di lingkungannya”.

Konsep keberfungsian sosial merujuk kepada kapabilitas dalam menjalankan perannya di dalam lingkungan baik secara individu, keluarga dan masyarakat. Setiap orang menjalankan keberfungsian sosialnya dan setiap orang pula memiliki daya ukur dalam menjalankan keberfungsian sosialnya. Di angka berapakah setiap orang menjalankan perannya apakah seseorang mampu menjalankan perannya secara sepenuhnya atautkah setengah-setengah, karena setiap orang

memiliki kesulitan-kesulitan tersendiri dalam menjalankan keberfungsian sosialnya.

Keberfungsian sosial (*social functioning*) merupakan bagian dari intervensi pekerja sosial dan menjadi hubungannya dengan pekerja sosial sehingga pengertian keberfungsian sosial menurut Fahrudin (2014: 42) merupakan: “Keberfungsian sosial (*social functioning*) adalah suatu konsep kunci untuk memahami kesejahteraan sosial, dan merupakan konsep penting dari pekerjaan sosial”.

Keberfungsian sosial (*social functioning*) dari pengertian diatas menyatakan bahwa suatu hal yang berdasarkan kesejahteraan sosial dan merupakan konsep penting dari pekerjaan sosial dan menjadi bidang garapan pekerjaan sosial untuk mengembalikan seseorang berfungsi lagi di dalam kehidupan sosialnya. Keberfungsian sosial (*social functioning*) menurut Sukoco (2011: 26) dapat dipandang dari berbagi segi diantaranya:

1. *Social Functioning* dipandang sebagai kemampuan melaksanakan peran sosial. Penampilan/pelaksanaan peran yang diharapkan suatu anggota suatu kolektif. Seseorang melakukan perannya di dalam lingkungan dan menjalankan aktifitasnya dengan semestinya.
2. *Social Functioning* dipandang sebagai kemampuan untuk pemenuhan kebutuhan. Orang selalu dihadapkan kepada usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan dilakukan oleh setiap orang tanpa pemenuhan kebutuhan kehidupan seseorang belum dianggap sejahtera.

3. *Social Functioning* dipandang sebagai kemampuan pemecahan masalah sosial. Orang di dalam usahanya memenuhi kebutuhan, melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan mewujudkan aspirasi tindakan mudah. Setiap orang melaksanakan tugas-tugasnya untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya dan penyelesaian masalah yang ada di dalam dirinya maupun lingkungannya.

2.5 Tinjauan tentang Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Menurut Jim Ife dalam Zubaedi (2013) pemberdayaan dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan serta keterampilan dari masyarakat atau diri individu untuk dapat meningkatkan kemampuan serta taraf hidup suatu kelompok masyarakat atau individu. Selain itu, pemberdayaan membuat seseorang dapat berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya.

Edi Suharto (2009) mengatakan bahwa pemberdayaan ditujukan kepada kemampuan orang secara umum dan kelompok rentan dan lemah secara khusus seperti fakir miskin, perempuan serta lanjut usia sehingga mereka dapat memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya agar mereka dapat bebas mengemukakan pendapat di muka umum, terbebas dari kelaparan, kebodohan, serta terbebas dari segala penyakit. Selain itu, kelompok rentan juga harus mempunyai kemampuan untuk menjangkau sumber-sumber produktif yang dapat membantu mereka untuk meningkatkan pendapatan serta memperoleh kebutuhan baik barang atau jasa yang mereka perlukan. Tak hanya itu, kelompok rentan juga dapat berpartisipasi. Kelompok rentan dapat menggunakan diskusi

dengan pihak terkait untuk membuat keputusan yang dapat mempengaruhi hidup mereka selanjutnya.

Inti dari suatu pemberdayaan meliputi tiga hal yaitu pengembangan individu atau suatu masyarakat, memperkuat potensi yang ada baik dari dalam diri masyarakat seperti keterampilan yang mereka miliki ataupun potensi dari luar diri masyarakat itu sendiri seperti potensi alam serta terciptanya kemandirian dari masyarakat untuk dapat melakukan pemberdayaan dan meningkatnya tingkat kesejahteraan sosial mereka (Winarni, 1998). Berdasarkan beberapa pengertian mengenai pemberdayaan yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas dalam diri seseorang atau kelompok rentan dengan cara menggali potensi dan sumber daya lokal yang dimilikinya.

2. Dimensi Pemberdayaan

Dimensi pemberdayaan masyarakat menurut Effendy dalam Rahman Mulyawan (2016) mengandung tiga pengertian yaitu:

- a. Enabling (pengembangan), diartikan sebagai terciptanya iklim yang mampu mendorong berkembangnya potensi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat yang bersangkutan mampu mandiri dan berwawasan bisnis yang berkesinambungan serta dapat mengembangkan potensi yang ada baik dari dalam diri atau potensi dari luar diri masyarakat.
- b. Empowering (memperkuat potensi), mengandung pengertian bahwa potensi yang dimiliki oleh masyarakat lebih diperkuat lagi. Pendekatan yang ditempuh adalah dengan cara meningkatkan skill dan kemampuan manajerial. Skill dan

kemampuan manajerial didapatkan melalui pelatihan, seminar atau kegiatan semacamnya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat memaksimalkan potensi yang ada. dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Memelihara mengacu pada kegiatan pemberdayaan yang berfokus pada perlindungan, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang seimbang terhadap potensi masyarakat yang rentan dalam berbagai aspek, sehingga menumbuhkan lingkungan persaingan yang sehat. Selanjutnya, masyarakat harus secara aktif melanjutkan kegiatan pemberdayaan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjangnya Indikator Pemberdayaan.

Parson et.al. (1994) dalam Suharto (2009) mengatakan bahwa pemberdayaan memiliki tiga dimensi, yaitu merujuk pada:

- a. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar seperti di suatu kelompok masyarakat.
- b. Sebuah keadaan psikologis individu yang ditandai oleh rasa percaya diri, rasa berguna serta mampu mengendalikan dirinya sendiri dan orang lain.
- c. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial yang melibatkan kelompok rentan untuk bersatu dan dapat mempengaruhi struktur yang dapat menekan kelompok mereka.

3. Proses Pemberdayaan

Secara umum, pemberdayaan masyarakat melibatkan beberapa tahapan yang dapat dilakukan, yaitu tahap persiapan (mencakup persiapan petugas dan persiapan

lapangan), serta tahap assessment (melibatkan identifikasi masalah, analisis kebutuhan, dan sumber daya yang tersedia). Selanjutnya tahap perencanaan alternatif program & pemformulasian rencana aksi, tahap pelaksanaan program, tahap evaluasi proses & hasil perubahan dan terakhir tahap terminasi (Adi, 2012).

a. Tahap Persiapan (Engangement)

Pada tahap persiapan, terdapat minimal dua tahapan yang harus dilakukan, yakni penyiapan petugas dan penyiapan lapangan. Penyiapan petugas melibatkan tenaga pemberdaya masyarakat, seperti community worker, yang berperan dalam proses pemberdayaan. Sementara itu, penyiapan lapangan menjadi syarat penting keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat, yang pada prinsipnya diarahkan untuk dilakukan secara non-direktif.

b. Tahapan Pengkajian (Assessment)

Proses assesment yang dilakukan bisa dilakukan secara individu melalui tokoh-tokoh masyarakat (key-person), atau melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pada tahap ini, petugas sebagai agen perubahan berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (feel needs) dan juga sumber daya yang dimiliki oleh klien. Dalam analisis kebutuhan masyarakat ini, berbagai teknik dapat digunakan untuk melakukan assessment, baik menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.

c. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahap ini, petugas sebagai agen perubahan berusaha secara partisipatif melibatkan warga dalam berpikir tentang masalah yang dihadapi dan cara-cara untuk mengatasinya. Dalam usaha untuk mengatasi masalah yang ada, diharapkan

masyarakat dapat mempertimbangkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat mereka lakukan.

d. Tahap Pemformulasian Rencana Aksi

Pada tahap ini petugas membantu masing-masing kelompok masyarakat untuk memformulasikan gagasan mereka dalam bentuk tertulis, terutama bila kaitannya dengan pembuatan proposal kepada pihak penyandang dana.

e. Tahap Pelaksanaan Program atau Kegiatan

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam program pemberdayaan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerjasama antara petugas dan warga masyarakat, maupun kerjasama antar warga. Pertentangan antar kelompok warga juga dapat menghambat pelaksanaan suatu program kegiatan.

f. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi sebagai proses pengawasan dan penilaian dari warga dan petugas terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga pada tahap ini akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal. Sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan dapat membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada.

g. Tahap Terminasi

Tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dalam suatu program pemberdayaan masyarakat, tidak jarang dilakukan bukan karena masyarakat sudah dapat dianggap mandiri, tetapi lebih karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan. Meskipun demikian, petugas tetap harus keluar dari komunitas sasaran secara perlahan-lahan dan bukan secara mendadak. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat tidak merasa ditinggalkan secara sepihak dan tanpa disiapkan oleh petugas. Karena itu, bila petugas merasa bahwa tugasnya belum diselesaikan dengan baik jarang petugas tetap melakukan kontak meskipun tidak secara rutin, dan kemudian secara perlahan-lahan mengurangi kontak dengan komunitas sasaran.

Adapun teori lain yang menjelaskan tentang tahapan pemberdayaan yaitu menurut Soerjono Soekanto dalam Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan (2019), pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan, sebagai berikut:

a. Tahapan Persiapan

Pada tahap ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan yaitu pertama, penyiapan petugas tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community worker dan kedua, penyiapan lapangan yang pada dasarnya dilakukan secara nondirektif. Penyiapan petugas atau tenaga pemberdayaan masyarakat sangat penting supaya efektivitas program atau kegiatan pemberdayaan dapat tercapai dengan baik.

b. Tahap Pengkajian

Tahap pengkajian atau assessment dapat dilakukan secara individual lewat kelompok-kelompok masyarakat. Pada tahap ini, petugas mengidentifikasi masalah keputusan dan sumber daya yang dimiliki klien. Ini dilakukan untuk menentukan sasaran pemberdayaan yang tepat.

c. Tahap Alternatif Program

Dalam tahapan ini, petugas akan berperan sebagai exchange agent atau agen perubahan. Masyarakat diharapkan bisa memikirkan beberapa alternatif program berikut kelebihan dan kekurangannya. Nantinya, alternatif tersebut dipakai untuk menentukan program yang paling efektif.

d. Tahap Pemformulasian Rencana Aksi

Pada tahap pemformulasian, agen perubahan membantu kelompok untuk menentukan program yang bisa mengatasi permasalahan. Petugas juga memformulasikan gagasan tersebut ke dalam tulisan, apabila ada kaitannya dengan pembuatan proposal pada penyandang dana.

e. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap implementasi, masyarakat harus memahami maksud, tujuan dan sasaran program untuk menghindari kendala dalam implementasi program. Mereka juga harus bekerja sama dengan petugas.

f. Tahap Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan. Program ini sebaiknya melibatkan warga untuk membangun komunitas pengawasan internal dan komunikasi masyarakat yang lebih mandiri.

g. Tahap Terminasi

Pada tahapan terakhir, proyek harus berhenti. Sebab, masyarakat yang diberdayakan sudah mampu mengubah kondisi yang sebelumnya buruk menjadi lebih baik. Dengan kata lain, mereka sudah bisa menjamin kehidupan layak bagi diri sendiri dan keluarga.

Berbagai faktor dan aspek organisasi yang mempengaruhi pemberdayaan oleh anggota masyarakat telah diusulkan oleh Laverack dan Wallerstein dan ditetapkan sebagai Organizational Domains of Community Empowerment (ODCE) atau Domain Organisasi Pemberdayaan Masyarakat (Kasmel & Tanggaard, 2011). ODCE menggambarkan kegiatan yang termasuk kedalam pemberdayaan masyarakat sebagai berikut

- a. Community activation, aktivasi dan mobilisasi masyarakat dianggap sebagai hal yang paling penting. Sebuah tindakan untuk meningkatkan kesadaran dan mengaktifkan orang, membuat anggota masyarakat tertarik dan mau berpartisipasi, melibatkan dan melibatkan pemangku kepentingan, menemukan dan memotivasi pemimpin baru, menciptakan dan mendorong jaringan baru, dan juga memulai dan menyadarkan suatu kelompok masyarakat baru dinilai penting bagi masyarakat untuk diberdayakan.
- b. Community competence empowerment, sebuah aktifitas pemberdayaan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat. Seperti meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan suatu hal tertentu, mendistribusikan pengetahuan hingga keterampilan praktis yang membawa masyarakat kedalam kemandirian.

- c. Management skills development, keterampilan manajemen telah menjadi fokus yang konsisten sebagai kegiatan penting untuk memperluas pemberdayaan masyarakat sejak awal program. Beberapa keterampilan manajemen dalam pemberdayaan masyarakat antara lain adalah pengajaran manajemen program dan keterampilan membangun tim, pelatihan teknik perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, dan meningkatkan kemampuan dan keahlian kelompok masyarakat dalam mengidentifikasi, memecahkan dan mengelola masalah mereka.
- d. Creation of a supportive environment, penciptaan lingkungan yang mendukung penting untuk memperluas pemberdayaan masyarakat dan mencapai tujuan dan sasaran seperti yang direncanakan. Seperti mengembangkan keterampilan lobbying anggota masyarakat, mengadvokasi dukungan atau sumber keuangan, mempromosikan akses yang lebih baik ke berbagai instansi dan sumber daya lain yang mendukung, meningkatkan kemampuan peserta untuk mempertahankan dan mempertahankan dukungan sosial yang lebih luas.

4. Upaya Pemberdayaan

Menurut Kartasasmita dalam Zubaedi (2013) upaya pemberdayaan harus dilakukan melalui tiga arah:

a. Memungkinkan potensi (Enabling)

Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Setiap manusia atau masyarakat telah memiliki potensi, sehingga pada saat melaksanakan pemberdayaan diupayakan agar mendorong dan

membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-potensi yang telah dimiliki.

b. Memperkuat potensi (Empowering)

Memperkuat potensi-potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Langkah pemberdayaan dilakukan melalui aksi-aksi nyata seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, informasi, lapangan kerja, pasar serta sarana prasarana lainnya. Hal tersebut dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas suatu masyarakat.

c. Melindungi masyarakat (Protection)

Dalam pemberdayaan masyarakat perlu diupayakan langkah-langkah yang mencegah persaingan secara tidak seimbang serta praktik eksplorasi yang kuat terhadap yang lemah. Melalui keberpihakan atau adanya aturan-aturan kesepakatan yang jelas dan tegas untuk melindungi golongan yang lemah.

5. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Merujuk pada pendapat Najiyati, dkk (2014), terdapat empat prinsip yang sering digunakan dalam program pemberdayaan, yakni prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/kemandirian, dan keberlanjutan.

a. Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan. Dinamika yang dibangun adalah

hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Sehingga terjadi proses pembelajaran.

b. Partisipatif

Dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat harus terlibat secara aktif. Masyarakat terlibat agar mendapatkan arahan dari pendamping untuk memotivasi dan mengembangkan dirinya sesuai kemampuan yang dimiliki agar mandiri dan mampu memenuhi kebutuhannya. Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Keswadayaan

Dalam proses pemberdayaan, bantuan atau dukungan untuk pengembangan kapasitas dan kemandirian, meskipun hasilnya baru dapat dinikmati dalam jangka panjang lebih diprioritaskan dari pada bantuan yang bersifat material. Dukungan dan bantuan tersebut hanya bersifat stimulant, sedangkan sumberdaya utama untuk pengembangan kapasitas dan kemandirian sebagian besar berasal dari masyarakat sendiri. Upaya menumbuhkan kembangkan kapasitas dan kemandirian yang berasal dari sumberdaya masyarakat sendiri inilah yang disebut keswadayaan.

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi

secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

2.6 Tinjauan tentang Kewirausahaan Sosial

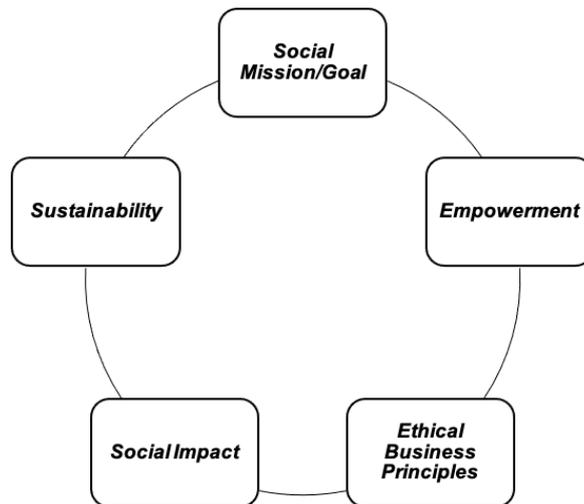
1. Pengertian Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan sosial merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan sosial. Solusi yang diharapkan adalah terjadinya perubahan sosial kearah yang lebih baik atau positif untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Kewirausahaan menurut Dhewanto (2013) menyatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh individu dengan ide-ide kreatif untuk memaksimalkan keuntungannya. Orang yang menjalankan hal ini disebut dengan pengusaha. Seorang pengusaha dipandang sebagai individu yang dapat melihat peluang dengan membayangkan kondisi yang lebih baik yang tidak diketahui oleh orang lain sehingga membuat maju bisnisnya. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep kewirausahaan sosial.

Menurut Nichols (Wibowo & Nulhaqim, 2015) kewirausahaan sosial adalah aktivitas yang efektif dan inovatif yang secara strategis berfokus pada usaha mengatasi kegagalan pasar sosial dan penciptaan peluang-peluang baru untuk meningkatkan nilai sosial secara sistematis menggunakan sumber daya dan beragam format organisasi untuk memaksimalkan dampak sosial serta membawa perubahan, sedangkan Peter Drucker (Dhewanto, 2013) mendefinisikan kewirausahaan dengan memfokuskan peluang dimana seorang Drucker melihat wirausaha sebagai pelaku ekonomi yang memanfaatkan dan menciptakan peluang dalam perubahan yang terjadi di masyarakat seperti teknologi, preferensi konsumen, dan norma-norma sosial. Seorang wirausaha selalu mencari perubahan,

merespon, dan memanfaatkan permasalahan yang ada sebagai peluang. Oleh karena itu, kewirausahaan sosial adalah proses untuk mengenali dan memanfaatkan peluang permasalahan sosial untuk menciptakan nilai sosial. Definisi kewirausahaan sosial yang lebih komprehensif adalah sebuah penciptaan nilai sosial yang dihasilkan melalui kolaborasi antara sekelompok orang dan organisasi dalam sebuah masyarakat yang sedang terlibat atau melaksanakan kegiatan ekonomi yang berdasarkan inovasi sosial (Hulgard, 2010).

2. Aspek Kewirausahaan Sosial



Gambar 2. 1 Aspek Kewirausahaan

Menurut (Haryanti et al., 2016) terdapat 5 aspek *social enterprise* yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kewirausahaan sosial di Indonesia, antara lain *social mission/goal*, *empowerment*, *ethical business principles*, *social impact*, dan *sustainability*.

- a. *Social Mission/Goal*. Tujuan dari pelaksanaan kewirausahaan sosial adalah menuntaskan masalah sosial yang ada atau bisa dikatakan sebagai *social*

mission. Ini merupakan sebuah latar belakang dari pendirian sekaligus tujuan bagi sebuah *social enterprise* untuk terus ada di tengah masyarakat.

- b. *Empowerment*. Masyarakat yang memiliki masalah sosial secara langsung maupun tidak langsung diedukasi dan didorong untuk ikut membantu diri mereka sendiri hingga mandiri dengan terlibat dalam proses penyelesaian masalah sosial tersebut. Hal ini menjadi kekuatan yang berkelanjutan dalam pemecahan masalah sosial.
- c. *Ethical Business Principles*. Pelaksanaan kewirausahaan sosial wajib menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang baik untuk mendukung keberlanjutan operasionalnya, seperti bertanggung jawab kepada konsumen, karyawan, stakeholders, masyarakat, dan lingkungan sekitar sehingga hal tersebut berdampak baik tidak hanya kepada bisnis itu sendiri namun juga dapat menciptakan perluasan dampak sosial.
- d. *Social Impact*. Tujuan utama dari sebuah kewirausahaan sosial adalah untuk membantu sesama secara mandiri dan berkelanjutan melalui kegiatan bisnis. Jadi, dampak sosial juga merupakan suatu tujuan utama yang perlu dicapai, selain target bisnis pada umumnya seperti pertumbuhan perusahaan dan profit.
- e. *Sustainability*. Keberlanjutan sebuah kewirausahaan sosial sangat penting dalam penciptaan dampak sosial yang *massive* dan keberlanjutan bisnis itu sendiri. Sehingga, perlu adanya orientasi jangka panjang dan berkelanjutan dari sebuah inisiatif kewirausahaan sosial

Hulgard (2010) memberikan pemahaman bahwa kewirausahaan sosial terdiri dari empat elemen utama yakni *social value*, *civil society*, *innovation*, dan *economic activity*.

- a. *Social Value*. Penciptaan nilai sosial merupakan elemen paling khas dari kewirausahaan sosial yaitu bagaimana menciptakan manfaat sosial yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
- b. *Civil Society*. Kewirausahaan sosial pada umumnya berasal dari inisiatif dan partisipasi masyarakat dengan mengoptimalkan modal sosial yang ada di masyarakat.
- c. *Innovation*. Tujuan dari kewirausahaan sosial adalah memecahkan masalah sosial dengan cara-cara inovatif antara lain dengan memadukan kearifan lokal dan inovasi sosial.
- d. *Economic Activity*. Pelaksanaan kewirausahaan sosial yang berhasil dan berkelanjutan pada umumnya diimplementasikan dengan cara menyeimbangkan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Penciptaan *economic opportunity* ini dapat dikembangkan untuk menjamin kemandirian dan keberlanjutan masyarakat dan organisasi itu sendiri.